

## Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)

**Trimulato**

UIN Alauddin Makassar  
trimsiuii@yahoo.co.id

**Rahmatia**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Rahmatia89@yahoo.com

### Abstract

*The development of Islamic economics in Indonesia continues to grow and is much in demand by the wider community. Islamic economics is expected to contribute to the economy in this country, including the realization of Sustainable Development Goals (SDGs). Islamic economics has many financial instruments including Sharia Banking, Sharia industries financial of non-bank (IKNB Syariah) and social fund raising institutions. This financial institution continues to grow and develop, the sharia banking market share reaches 5.8 percent, the IKNB Syariah products are increasing, and the collection of social funds through the Funding of Zakat institution makes social funds well organized both in their collection and distribution. People can access all instruments of Islamic economic institutions to help their economy. This research is a literature study and uses qualitative descriptive analysis techniques. This study describes the growth of Islamic economic institutions and the economic role of Islam for the realization of the SDGs. The results of this study show that sharia banking continue to experience asset growth in the period of 2017. Sharia banking has assets reached 477,327,000,000,000 or grew by 12.53%. The growth of Sharia IKNB increased in 2018 by 35 institutions or grew by 64.81%. In the collection of funds there was a growth of 17.48 for infaq and shadaqah, while other social funds grew by 120.86%. Islamic economics and all its instruments, including Islamic economic institutions consisting of sharia banking, sharia IKNB and social fund collection institutions have the same purpose as the SDGs concept that the government wants to achieve. So that the existence of Islamic economic institutions has an important role to reach the SDGs especially to achieve economic prosperity and equality of better livelihoods and poverty alleviation.*

**Keywords: Islamic Economy, Sustainable Development Goals (SDGs)**

### A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah mahdah, hubungan manusia dengan sang pencipta Allah swt, maupun yang bersifat ibadah muamalah, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu yang menjadi yang diatur dalam islam saat ini tentang ekonomi, yang

beberapa ini makin sering terdengar, makin sering didiskusikan, dan makin banyak diminati saat-saat ini.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. (P3EI UII. 2008)

Syariat Islam memberikan acuan kepada pengikutnya tentang prinsip-prinsip dasar dalam perilaku ekonomi individu yang mengarah pada tujuan-tujuan umum (maqashid al-syariah), yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, Islam memberikan ruang cukup luas bagi para ilmuwan untuk melakukan kajian mendalam dan serius dalam banyak bidang, termasuk studi tentang ekonomi Islam, untuk memilih strategi yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi dan sosial yang ada. Syariat Islam memberikan ruang untuk dilakukan kontekstualitas (ijtihad) dengan tidak melakukan pelanggaran secara esensial. Kajian itu, agar Islam menjadi produktif (Islam Empiris). Khasanah Islam yang memberikan ruang kepada ilmuwan muslim untuk melakukan kajian mendalam sehingga mampu mengembangkan keilmuan Islami yang masalah. (Minarni. 2015)

Untuk mengetahui apakah suatu ucapan atau perbuatan dicintai dan diridhai Allah atau tidak, kita harus merujuk kepada alqur'an dan as-sunnah, berdasarkan bimbingan ulama ahlu sunnah waljama'ah, bukan berdasarkan pendapat atau kemauan sendiri. Serta harus diingat bahwa ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan semata ridha dari Allah. Termasuk dalam hal mu'amalah telah diatur agar terhindar dari hal yang dilarang. Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Aktivitas muamalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pemahaman yang lebih sempit mengenai muamalah adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis. Perkembangan ekonomi syariah harus terus diperjuangkan, tidak hanya dari segi isi dan objeknya, tetapi juga sisi subjek pelakunya. Para pelaku ekonomi syariah haruslah setiap muslim yang memahami

hakikat sistem ekonomi Islam, adalah pribadi yang secara lahir batin berjuang menegakkan hukum-hukum Allah khususnya di bidang ekonomi. Diantara kiat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah bagi para pelaku ekonomi syariah adalah dengan senantiasa meningkatkan nilai-nilai keyakinan dan akidah.(Fahmi. 2014)

Dalam pandangan Islam, eksistensi kehidupan manusia tidak terlepas dari naluri kehidupan manusia yang dibawa sejak lahir terdiri dari 3 hal yaitu: (Gita. 2006)

1. Naluri mempertahankan diri (*ghorizatul baqa*)

Naluri memperetahankan diri untuk kelangsungan hidup diberikan Allah kepada semua makhluk hidup termasuk manusia.

2. Naluri melangsungkan keturunan (*ghorizatun nau'*)

Naluri untuk melangsungkan keturunan diberikan Allah kepada semua makhluk hidup sama dengan naluri mempertahankan diri.

3. Naluri beragama (*ghorizatun taddayun*)

Naluri beragama hanya diberikan kepada ciptaan Allah makhluk terbaik di muka bumi yang diberi nama manusia. Bukti bahwa manusia memiliki naluri beragama adalah ketika terjadi kondisi yang sangat menakutkan maka dalam hati terjadi kondisi yang sangat menakutkan maka dalam hati mengatakan adanya yang maha kuasa di muka bumi ini dan meminta perlindungan dari-Nya.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.(P3EI UII. 2008)

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi Islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada

saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan maqasid. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.(Chapra. 2001)

Pemenuhan dasar masyarakat merupakan dasar karakteristik ekonomi Islam, ia merupakan fondasi kebijakan ekonomi sebuah negara. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mementingkan kekayaan sektor swasta, ketika sistem ini mulai nampak keburukannya, didirikanlah lembaga-lembaga asuransi, charity, (amal) untuk menyantuni kaum fakir miskin. Hal ini dilakukan untuk meringankan kezaliman yang telah diakibatkan oleh sistem ini. Karena jaminan sosial, asuransi, dan lainnya bukanlah fondasi dari sistem ekonomi kapitalis, namun hanya kebijakan temporal, untuk meringankan kezaliman yang telah dilakukannya. Begitupun dengan ekonomi sosialis, yang muncul sebagai lawan dari sistem kapitalis, yang memiliki sistem penyamarataan semua golongan masyarakat secara berlebihan, sehingga menghilangkan kepemilikan pribadi. Jikapun ada jaminan sosial yang diberikan, ia hanya merupakan implementasi penyamarataan tersebut, tanpa peduli apakah jaminan itu dapat memenuhi kebutuhan dasar atau tidak. Dalam ekonomi Islam disamping benda fisiki, barang publik juga mencakup kebutuhan nonfisik, seperti kebutuhan akan kedaulatan dan hukum, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan pemerintahan. Yang membedakan masyarakat Islam dari yang lainnya adalah pengakuan terhadap kebutuhan religius secara publik salah satu contoh adalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk pendidikan moral religius anak-anak, maka pemberantasan pornografi dan membersihkan area publik dari mengekspos dosa yang berlawanan dengan religiusitas menjadi tugas negara.(Huda dan Muti. 2011)

Tujuan dari SDGs juga dapat dicapai dengan melibatkan banyak lembaga, termasuk diantaranya yaitu lembaga keuangan syariah. Hal ini karena pencapain SDGs sejalan dengan tujuan yang dicapai dalam konsep ekonomi Islam. Ada kesamaan dalam tujuan dan sejalan dengan apa yang ingin dicapai keduanya. United Nations Development Program (UNDP) Indonesia mengadakan Roundtable Discussion dengan Tema: “Leveraging Innovative Financing for Development: Islamic Banking & Finance for SDGs” mengundang Tazkia untuk berbagi pengalaman penerapan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia pada 25 September 2018. Murniati Mukhlisin, Ketua STEI Tazkia, hadir menyampaikan betapa

Maqashid Syariah memiliki tujuan yang sama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituju oleh UNDP. Murniati juga menjelaskan besarnya potensi keuangan syariah di dunia. “Berbagai negara di Eropa seperti Perancis, Jerman, Luxembourg, UK terlebih lagi negara Muslim seperti Iran, Malaysia, UAE, Arab Saudi dan Indonesia memiliki perhatian besar terhadap perkembangan keuangan syariah yang tampak dari pertumbuhan aset”, “Dengan dukungan dari UNDP, regulator, perbankan syariah, FinTech, dunia pendidikan, dan lembaga sosial, diharapkan tujuan mulia ekonomi syariah yang juga senada dengan SDGs dapat tercapai dengan sebaik mungkin”, kata Murniati menegaskan. (<http://mysharing.co.id>)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka The 2nd Annual Islamic Finance Conference yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 Agustus 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Konferensi ini mengangkat tema “The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality”. Di acara tersebut Menkeu menjelaskan saat ini dunia memiliki tujuan baru, yaitu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG). Dalam hal ini peran keuangan syariah sangat penting, sesuai dengan tujuan dari negara-negara Islam untuk memberantas kemiskinan dan penyetaraan pendapatan. “Nilai-nilai dalam Islam sejalan dengan tujuan untuk mencapai SDG, namun diperlukan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah. Lebih jauh Menkeu menyampaikan bahwa dalam Islam terdapat dua instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan fungsinya untuk mendukung tercapainya SDG, yaitu zakat dan wakaf. “Saat ini yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah zakat fitrah, namun untuk zakat mal atau zakat harta belum terlalu banyak yang membayar. Seperti halnya pajak, masih terdapat hambatan untuk mengumpulkan zakat fitrah,” Untuk itu, Menkeu berpesan agar Badan Zakat Nasional ataupun lembaga pengelola zakat lainnya dapat lebih mensosialisasikan definisi 'mal' serta menerapkan pengelolaan zakat yang transparan. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dan mewakafkan harta dalam bentuk tanah atau bangunan untuk dipergunakan sebagai masjid, sekolah, dan pemakaman. Bangunan-bangunan tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih luas dan dikembangkan agar dapat mendukung tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Penyelesaian permasalahan ketimpangan atau inequality dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain: program peningkatan perlindungan sosial, memperbanyak peluang pelatihan keterampilan tenaga kerja dan perbaikan layanan umum seperti fasilitas kesehatan,

pendidikan, dan Lain – lain. Peningkatan program perlindungan sosial dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai ataupun dalam bentuk subsidi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan, memperbanyak peluang pelatihan keterampilan tenaga kerja dapat dilakukan dengan membuka dan mengintensifkan balai-balai latihan kerja serta memberdayakan masyarakat terpelajar seperti akademisi atau praktisi di berbagai bidang untuk berbagi pengalaman kepada masyarakat. Dengan demikian tingkat literasi masyarakat mengenai hal-hal baru akan cepat tersampaikan. Tidak kalah penting peningkatan kualitas pendidikan juga sangat diperlukan untuk membantu menurunkan ketimpangan. Menurut studi yang dilakukan oleh HAAS institute, University of California Berkeley menyebutkan bahwa peningkatan kualitas sekolah merupakan hal terpenting untuk menurunkan ketimpangan antar generasi yang akan datang. Meningkatkan kualitas pendidikan dapat meningkatkan mobilitas ekonomi yang berdampak pada meningkatnya produktivitas dan mengurangi ketimpangan. Tentunya untuk melakukan solusi tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai sisi termasuk sisi material. Untuk itu diperlukan sumber pendanaan yang dapat mengakomodasi hal tersebut. (<https://sef.feb.ugm.ac.id>)

Islam sebagai agama yang paripurna dan bersifat Universal, telah mengatur segala sisi kehidupan mulai dari yang terkecil hingga suatu yang dianggap hal besar. Semua bagian yang menyangkut hajat hidup manusia telah diatur secara gamblang dalam islam baik itu ibadah yang merupakan perwujudan hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Pencipta. Atau pun dalam sisi syariah dan Muamalah yang merupakan perwujudan hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pada sisi Muamalah, islam mengatur dalam segala sisi baik ekonomi, sosial, politik dan lain – lain. Salah satu hal penting yang diatur adalah dalam sisi sosial ekonomi. Pada sisi sosial ekonomi islam memiliki keunggulan yaitu adanya instrumen islamic funding yang memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi yang salah satunya yaitu ikut berperan dalam langkah kesuksesan tercapainya sustainable development Goals (SDGs). Yang dimaksud instrumen Islamic Funding disini yaitu sektor Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf (ZISWAF). Adanya sektor Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf (ZISWAF) ini sesuai perintah dalam Alquran berperan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat. Sedangkan, waqaf sendiri memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan Infrastruktur di masyarakat. (<https://sef.feb.ugm.ac.id>)

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pendelaman terkait konsep ekonomi Islam yang memiliki arah dan tujuan yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan sustainable Development Goals (SDGs). Penulis akan melakukan penelitian mendalam tentang peran dari ekonomi Islam dan perangkatperangkatnya dalam berkontribusi membangun SGD.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perkembangan Instrumen Ekonomi Islam ?
- b. Bagaimana peran ekonomi Islam bagi pencapaian Sustanaible Development Goals (SDGs) ?

### **Tujuan Masalah**

- a. Untuk mengetahui perkembangan instrumen-instrumen ekonomi Islam
- b. Untuk mengetahui peran ekonomi Islam dalam mencapai sustainable development Goals (SDGs)

### **Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Muhammad Fardan Ngoyo dalam penelitiannya yang berjudul *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan* menyimpulkan bahwa Tujuan pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang taken for granted yang serta merta harus diikuti tanpa pernah memikirkan bagaimana dampak dan kontribusinya bagi rakyat banyak. Pada intinya proses pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada tiga komponen yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling terhubung. Tercapainya tujuan dan target SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah. Selain itu, upaya serius dari pemerintah belumlah cukup bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang menyokong terlaksananya tujuan tersebut. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena,

tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang. (Fardan. 2015)

Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri dalam papernya yang berjudul *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu maupun proses yang partisipatif. Tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan SDGs tidak hanya seputar dua hal itu saja. Dari segi substansi, ambisi SDGs untuk menghilangkan komponen negasi pembangunan secara tuntas merupakan suatu pekerjaan yang hampir mendekati utopia. Dari segi proses pun, pelaksanaan SDGs di tingkat nasional masih meninggalkan pekerjaan rumah seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan juga proses partisipasi itu sendiri. Hal ini seharusnya tidak perlu dipandang sebagai beban melainkan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Peranan aktif pemerintah tentu menjadi modal utama bagi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia. (Panuluh dan Riskia. 2016)

Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalangan bersama baik vertical maupun horizontal. (Ishartono dan Tri. 2016)

Wahyuningsih dalam penelitiannya yang berjudul *Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial*. Menyimpulkan Sustainable development goal's (SDG'S) merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Dimana konsep SDG'S ini melanjutkan konsep dari MDG'S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG'S dan SDG's punya persamaan dan kesamaan tujuan yang sama. Yaitu SDG'S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG'S yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs ini tidak terpisah dari MDGs, SDGs



merupakan bentuk penyempurnaan MDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development Goals). SDG's memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.(Wahyuningsih. 2017)

Abdul Hamid dan Aris dalam penelitiannya yang berjudul Peran Perbankan Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan menyebutkan bahwa Rasionalisasi keberadaan lembaga bank syariah harus berfokus pada pemerataan kekayaan kepada seluruh masyarakat khususnya kaum miskin yang diharapkan akan memberikan kemampuan daya beli sejalan dengan konsep alquran yaitu zakat. Pemberdayaan dana zakat dalam hal ini sebagai instrumen paradigma, konsepsi dan filosofis sementara bank syariah sebagai instrumen implementatif, operasional empirik yang akan diharapkan berjalan searah menuju masyarakat yang berkesadaran ekonomi ilahiyah dalam rangka mengurai kesenjangan yang semakin melebar. Kesadaran oleh semua unsur dalam menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah serta perannya dalam pembangunan khususnya mengurai kesenjangan tersebut diperlukan kerja keras serta pemikiran yang kritis dengan meriview kembali keberadaannya.(Hamid. 2017)

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian berfokus kepada lembaga ekonomi Islam tentang pencapaian sustanaible Development Goals (SDGs). Jika penelitian sebelumnya banyak berfokus pada penerapan SGD's, penelitian ini menguraikan bagaimana pencapaian SDGs melalui lembaga ekonomi Islam.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Ekonomi islam**

Ekonomi Islam didefenisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Disamping itu ekonomi islam sebagai aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.(Sholahuddin.2007) Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antarindividu atau

kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, bekerja, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu. (P3EI UII. 2008)

Ekonomi islam muncul dari sebagai refleksi atas *kekaaffahan* keislaman seorang muslim. Ekonomi islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tidak boleh dikatakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi. (Sami'. 2006)

Ilmu ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel indeviden (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang. (Karim. 2006)

Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup tiap orang. Ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup Islami. Hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri,

beserta orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Atau, bila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka baitul maal yang wajib memenuhinya. (An-Nabhani. 2009).

Ekonomi Syariah/Islam memiliki pandangan bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di dalam ini harus dialokasikan secara adil menurut aturan syariah Islam. Dalam ekonomi Islam ternyata harta kekayaan tidak langsung mengalokasikan seluruh harta kekayaan itu ke dalam mekanisme pasar, sebagaimana yang ada dalam tubuh ekonomi kapitalisme. Didalam ekonomi pasar syariah, seluruh harta kekayaan yang ada harus menjalani tiga tahan penyaringan, yaitu Pra pasar, Mekanisme pasar, dan Pasca pasar. Sebelum harta kekayaan masuk dalam mekanisme pasar, seluruh harta kekayaan tersebut terlebih dahulu harus disaring dalam tahapan penyaringan pra pasar. Pandangan ekonomi Islam harta itu harus dipilah atau dibagi terlebih dahulu menurut jenis kepemilikannya. Pembagian kepemilikan harta dalam pandangan ekonomi Islam, yaitu dibagi menjadi tiga yaitu; kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Manfaat tentu akan dapat terlihat secara langsung yaitu limpahan sumber daya alam akan langsung dikelola negara, selanjutnya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Condro.2017)

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat (sekunder), dan ada juga yang bersifat tahsini (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingan tersebut yaitu; (Sahroni dan Karim. 2017)

1. *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsinat*, yaitu kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut harus dilengkapi dengan adanya tujuan yang mulia, yang disebut dengan maqhasid syariah atau yang biasa disebut kulliyat alkhamsah (lima prinsip umum) yaitu; *Hifdzu din* (melindungi agama), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu mal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat. (P3EI UII. 2008) Begitupun dalam ekonomi islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip yang membangunnya. Bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi islam. Teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act* dan *sosial justice*. (Karim. 2006)

Diatas prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ahlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari islam, yaitu al-qur'an dan as-sunnah terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. (Condro. 2012)

### **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini: Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan, Pengentasan segala bentuk kemiskinan di

semua tempat. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera, Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas, Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan 5 - Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan, Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan, Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14 - Ekosistem laut, Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan 15 - Ekosistem daratan, Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan, Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. (<https://id.wikipedia.org>)

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya

adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia. (BPS.2016)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nation General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa - New York (Amerika Serikat). TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 320 Indikator. (Bappenas.2017)

25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki

kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. SDGs Dirancang Secara Partisipatif Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (Leave No One Behind) Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. (<https://www.sdg2030indonesia.org>)

Setelah mengusulkan 10 tujuan ini, SDSN pada tanggal 25 Juli 2014 mengeluarkan publikasi yang berjudul Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDGs. Dalam publikasi ini SDSN memadukan SDGs usulan OWG dan SDSN. Oleh karena itu, dari publikasi ini diusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. Dalam kajian ini, indikator-indikator yang diusulkan dalam publikasi ini yang dijadikan dasar rujukan.(BPS.2014)

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah pertumbuhan dari lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, Kemudian desain peran dari lembaga-lembaga ekonomi Islam tersebut dalam pencapaian sustainable development Goals (SDGs). Konsep keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya). (Farizal.2010)

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur. Berupa teori yang berkaitan dengan SDGs dan ekonomi Islam khususnya tentang lembaga-lembaga ekonomi Islam.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga. Diantaranya data yang diperoleh dari Otoritas Jasa keuangan dan sumber data lainnya.

### **Batasan Penelitian**

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada perkembangan dari lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, serta pola SDGs. Keduanya sejalan dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan. Dengan menyesuaikan pola dari lembaga-lembaga ekonomi Islam dalam kegiatannya mendukung dan sejalan dengan SDGs yang terus dicanangkan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), serta terkait dengan ekonomi Islam, terkait lembaga keuangan Islam, serta peran lembaga-lembaga ekonomi Islam untuk mencapai SDGs.

#### **2. Pengamatan**

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi pertumbuhan dari lembaga-lembaga ekonomi Islam serta terkait data tentang peran dan tujuan dari SDGs yang sejalan dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang telah ada sebelumnya.

### **Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan perkembangan dari lembaga-lembaga ekonomi Islam dan melakukan analisis dari hasil tersebut, serta menguraikan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah. Kemudian tujuan dari SDGs yang sejalan dengan tujuan dari ekonomi Islam. Keberadaan lembaga



keuangan syariah memiliki peran yang kuat dalam pencapaian SDGs. Lembaga-lembaga ekonomi Islam sejalan dengan tujuan SDGs.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Lembaga-lembaga Ekonomi Islam di Indonesia

a. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

##### Perkembangan Bank Syariah Desember 2018

No	Komponen	Tahun 2017	Tahun 2018	Pertumbuhan
1	Aset	424.181	477.327	12,53 %
2	Jumlah Kantor	2.169	2.229	2,77 %
3	Jumlah Rekening Nasabah	25.836.223	29.068.132	12,51 %
4	Dana Pihak Ketiga	334.888	371.828	11,03 %
5	Pembiayaan	285.695	320.193	12,07 %

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (*Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*) (Data Diolah)

Dari data menunjukkan adanya perkembangan dari bank syariah yang merupakan bagian dari lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Pada beberapa indikator yang ada di Bank Syariah mengalami pertumbuhan pada periode desember 2017 sampai dengan desember 2018. Pertumbuhan terbesar pada komponen aset yang tumbuh sebesar 12,53 persen. Kemudian pertumbuhan terbesar selanjutnya yaitu pada komponen jumlah rekening nasabah yang tumbuh sebesar 12,51 persen ada sekitar 29.068.132 orang yang memiliki rekening di bank syariah. Adapun pertumbuhan terkecil pada komponen jumlah kantor bank syariah yang hanya tumbuh 2,77 persen, kantor bank syariah yang tersebar belum mencapai 3.000 unit.

Meskipun bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam perjalanannya, tetap membutuhkan dukungan dan usaha agar bisa tumbuh lebih besar lagi. Dengan

pertumbuhan bank syariah akan meningkatkan peran dan kontribusi bank syariah bagi perekonomian serta keberadaannya akan dinikmati semua kalangan. Apalagi saat ini market share bank syariah masih dikisaran 5,8 % jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sehingga sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak agar bisa lebih tumbuh dan berkontribusi lebih besar.

b. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia (IKNB Syariah)

**Perkembangan IKNB Syariah Desember 2018**

No	Komponen	Tahun 2017	Tahun 2018	Pertumbuhan
1	Jumlah Lembaga IKNB	54	89	64,81 %
2	Aset	99.133	96.905	-5,22 %
3	Ekuitas	42.721	43.541	1,92 %
4	Aset Produktif	66.755	65.174	-2,37 %
5	Liabilitas	51.065	51.654	1,15 %

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Statistik IKNB Syariah Desember 2018) (Data Olah)

Data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan dari Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) yang juga merupakan lembaga Ekonomi Islam di Indonesia. IKNB Syariah terdiri dari beberapa lembaga yaitu Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Khusus Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dari data menunjukkan pertumbuhan IKNB Syariah pada periode Desember sampai dengan desember 2018. Beberapa komponen mengalami pertumbuhan positif namun ada komponen yang mengalami penurunan. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu jumlah lembaga IKNB Syariah yang tumbuh sebesar 64,81 persen atau bertambah 35 lembaga di tahun 2018. Kemudian pertumbuhan ekuitas yaitu tumbuh sebesar 1,92 persen. Adapun komponen aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 5,22 persen.

IKNB Syariah menjadi pelengkap dari perbankan syariah yang memberi akses layanan kepada masyarakat. Keberadaan IKNB Syariah belum begitu besar dikenal ditengah masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan IKNB Syariah. Dibutuhkan upaya dorongan dari semua pihak untuk menumbuhkan IKNB Syariah agar dapat lebih berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat. Variasi produk dari IKNB Syariah menjadikannya memberi penawaran kepada masyarakat yang menghendaki jasa layanan keuangan syariah selain perbankan syariah. Produk-produk dari IKNB syariah bisa menjadi

pilihan dalam kegiatan berekonomi masyarakat. Hanya saja membutuhkan upaya memperkenalkannya ditengah masyarakat agar dapat terus tumbuh dan ikut mendorong perkembangan ekonomi.

c. Pertumbuhan produk lembaga sosial syariah di Indonesia

**Pertumbuhan Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

No	Lembaga Zakat	Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2016	Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2017	Pertumbuhan %
1	BAZNAS	111.690.914.428	92.568.574.079	-17,12
2	BAZNAS Provinsi	192.609.000.494	644.859.329.420	234,80
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	3.311.745.042.02 4	876.626.483.800	-73,53
4	LAZ Lainnya	1.401.248.170.00 5	2.039.218.862.993	45,53
5	Total	5.017.293.126.95 0	3.653.273.250.292	-21,19

**Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS 2016 dan 2017 (Data Diolah)**

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan dana sosial yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) baik pusat maupun dan lembaga amil zakat lainnya yang ada dan resmi. Zakat dan dana sosial/kebijakan lainnya merupakan bagian dari instrumen yang dimiliki oleh ekonomi Islam, instrumen menjadi pendistribusi kekayaan (harta) bagi semua manusia, agar harta tidak menumpuk dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan penghimpunan dana sosial melalui lembaga Amil Zakat pada tahun 2016 dan Tahun 2017. Pertumbuhan terbesar pada penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi yang tumbuh sangat besar mencapai 234,80 persen, pertumbuhan selanjutnya juga terlihat pada LAZ lainnya yang tumbuh sebesar 45,53 persen. Adapun penghimpunan dana pada BAZNAS pusat mengalami penurunan sebesar 17,12. Begitupun secara total penghimpunan dana sosial yang mengalami penurunan sebesar 21,19 persen.

No	Jenis Dana	Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2015	Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2016	Pertumbuhan %
1	Zakat	3.738.216.792.496	2.312.195.596.498	-38,15
2	Infak/Sedekah	1.001.498.305.006	1.176.558.166.696	17,48
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	277.336.514.452	163.986.086.154	-40,87
4	Dana Sosial Lainnya	241,514,997	533.400.945	120,86
5	Jumlah	5.017.293.126.950	3.653.273.250.292	-21,19

### **Pertumbuhan Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana**

**Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS 2016 (Data diolah)**

Data diatas menunjukkan pertumbuhan penghimpunan dana sosial berdasarkan jenis dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga Amil Zakat (LAZ). Pertumbuhan penghimpunan dana sosial pada periode tahun 2015 dan tahun 2016 pada jenis zakat mengalami penurunan sebesar 38,15 persen, sedangkan pada jenis infaq/sedekah mengalami pertumbuhan 17,48 persen. Adapun dana-dana sosial lain yang berhasil dihimpun tumbuh mencapai 120,86 persen.

Hadirnya lembaga amil zakat untuk menghimpun dana sosial sangat baik, dan sosial dapat teroganisir secara baik, begitupun dengan penyalurannya. Data penghimpunan dana sosial dapat diketahui, penyalurannya juga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan jenis dana sosialnya. Lembaga Amil Zakat menjadi wadah bagi perorangan atau lembaga yang hendak mengeluarkan dana sosialnya baik itu zakat maupun infaq dan sedekah. Peran dan keberadaan zakat perlu didorong dan didukung dari semua pihak mengingat saat ini pola hidup Islami semakin marak ditengah masyarakat. Banyak masyarakat yang hendak berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan. Khususnya ketika terjadi bencana kesadaran masyarakat untuk berbagi dan peduli semakin nampak terlihat.

## **Peran Ekonomi Islam dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keuangan syariah bisa menjadi salah satu solusi dunia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). "Prinsip-prinsip khas keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan menjadikan pengembangan sistem keuangan syariah sangat relevan dengan pencapaian target-target SDGs," Keuangan syariah tidak hanya menjangkau aspek pemberantasan kemiskinan. Juga mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, antisipasi perubahan iklim dan penurunan ketimpangan tingkat pendapatan. "OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan di Indonesia terus mendorong perkembangan sektor keuangan syariah, mulai dari sektor perbankan syariah IKNB syariah dan pasar modal syariah," (<https://ekbis.rmol.co>)

Bank Indonesia, bersama Islamic Development Bank (IDB), mengangkat peran ekonomi dan keuangan syariah untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Fokus isu ini diusung dalam forum internasional keuangan syariah (Global Forum Islamic Finance) yang diselenggarakan tanggal 16 Mei 2016, di Jakarta. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah "Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals" dengan harapan bahwa industri keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan. SDGs merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimulai pada 2012. PBB merekomendasikan kepada seluruh negara untuk mengadopsi SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pencapaian, yang antara lain mencakup pemberantasan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi. Terkait SDGs, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pandangan bahwa SDGs sejalan dengan semangat keuangan syariah yang berdasarkan nilai – nilai etika Islam yang diturunkan dari tujuan syariah (maqasid al-Shariah). Oleh karena itu, forum ini menjadi penting untuk mendiskusikan pengembangan keuangan syariah untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. pandangan Bank Indonesia mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai SDGs dan peran BI dalam mendukung sektor sosial yaitu zakat dan wakaf

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif.(  
<https://www.bi.go.id>)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir sebagai pembicara pada 2nd Annual Islamic Finance Conference yang digelar Kementerian Keuangan di Yogyakarta, 26-27 Agustus 2017. Dalam sambutannya, Menteri Bambang berharap konferensi internasional yang dihadiri para pemangku kepentingan keuangan syariah tersebut menjadi ajang berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang bagaimana keuangan syariah dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta berfungsi sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah dan publik dalam mencapai target pembangunan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan meminimalkan jurang pendapatan. “Patut diingat, meski mayoritas negara di dunia tengah mengalami perbaikan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu penting, termasuk bagi Indonesia. Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar dunia, juga memiliki potensi tersembunyi yang harus dimanfaatkan dengan baik, hati-hati, dan penuh amanah, yakni dana sosial keagamaan, termasuk zakat dan wakaf. Jika dikelola dengan baik, dana tersebut dapat berkontribusi secara signifikan pada berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga target RPJMN 2015-2019, TPB/SDGs, serta Agenda 2030 dapat tercapai. Sejumlah pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sragen sudah menjadikan zakat dan wakaf sebagai penyokong utama program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).(Bappenas)

Indonesia memiliki tanah wakaf sekitar 4,3 miliar meter persegi dengan mayoritas penggunaan sebagai masjid dan pemakaman umum, sedangkan wakaf tunai baru mencapai 22 miliar rupiah. Wakaf harus diatur agar dapat bermanfaat dengan baik seperti untuk pembangunan rumah sakit dan kebutuhan wirausaha syariah. Sementara itu, data terakhir menunjukkan bahwa pengumpulan zakat pada 2016 mencapai 2,3 triliun rupiah. Angka tersebut diprediksi hanya sebesar tiga persen dari potensi seharusnya. Maka, sejumlah pihak berwenang harus berusaha secara maksimal agar dapat mengumpulkan zakat yang dapat menjadi sumber dana program pengentasan kemiskinan seperti penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, terutama bagi masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Menteri Bambang mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia yang telah menerbitkan Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada 2015 serta kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian

Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia yang meluncurkan rencana aksi komprehensif yang fokus untuk menjalankan sistem pelaporan dan tata kelola obyek zakat dan wakaf serta perbaikan akuntabilitas laporan zakat dan wakaf. “Diperlukan peran menyeluruh dari semua pihak untuk bersama mengatasi tantangan implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah terkait penggunaan zakat dan wakaf adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola, pendaftaran obyek zakat dan wakaf, sistem penggunaan zakat dan wakaf, serta tata kelola zakat dan wakaf tersebut. (Bappenas)

Ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik, minat masyarakat menggunakan produk-produk ekonomi Islam semakin meningkat disemua kalangan. Kini saatnya ekonomi Islam untuk mengabil peran yang lebih besar bagi kontribusi bagi negara. Salah satunya dengan mendukung dan ikut serta mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustanaible Development Goals/SDGs). Meskipun secara prinsip dan operasional sistem ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tujuan utama ekonomi Islam yaitu mencapai falah, diantaranya menciptakan kesejahteraan untuk ekonomi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatsi kemiskinan, dan penciptaan kesetaraan. Melalui lembaga ekonomi Islam pencapaian SDGs dapat terwujud. Bank syariah sebagai lembaga intermediari penghimpun dan penyaluran dana, dapat berkontribusi untuk SDGs. Melalui pembiayaan produktif yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat berkontribusi untuk SDGs. Dari berbagai produk IKNB Syariah masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang berbasis syariah dengan mudah, msyarakat dapat memperoleh penambahan modal dan menggunakan akses investasi. Peran lembaga sosial dalam menghipun dan sosial zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat mendukung untuk terwujudnya SDGs. Melalui lembaga sosial pendistribusian kekayaan dapat tercapai, bagian upaya untuk mengatasi kemiskinan, serta pemerataan pedapatan. Wujud adanya kepedulian kepada sesama ummat manusia. Ekonomi Islam dengan seperangkatnya khususnya lembaga keuangan ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan SDGs untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Perkembangan lembaga Ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan secara positif. Bank Syariah mengalami pertumbuhan pada periode desember 2017 sampai dengan desember 2018. Pertumbuhan terbesar pada komponen aset yang tumbuh sebesar 12,53 persen. Kemudian pertumbuhan terbesar selanjutnya yaitu pada komponen jumlah rekening nasabah yang tumbuh sebesar 12,51 persen ada sekitar 29.068.132 orang yang memiliki rekening di bank syariah. IKNB Syariah terdiri dari beberapa lembaga yaitu Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Khusus Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pertumbuhan IKNB Syariah pada periode Desember sampai dengan desember 2018. Pertumbuhan terbesar yaitu jumlah lembaga IKNB Syariah yang tumbuh sebesar 64,81 persen atau bertambah 35 lembaga di tahun 2018. Pertumbuhan penghimpunan dana sosial pada periode tahun 2015 dan tahun 2016 pada infaq/sedekah mengalami pertumbuhan 17,48 persen dan dana-dana sosial lain yang berhasil dihimpun tumbuh mencapai 120,86 persen.

Keberadaan Ekonomi Islam dan komponennya memiliki peranan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dalam mencapai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi penghimpun dan penyaluran dana, dapat berkontribusi untuk SDGs. Melalui pembiayaan produktif yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat berkontribusi untuk SDGs. Dari berbagai produk IKNB Syariah masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang berbasis syariah dengan mudah, masyarakat dapat memperoleh penambahan modal dan menggunakan akses investasi. Peran lembaga sosial dalam menghimpun dan sosial zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat mendukung untuk terwujudnya SDGs. Melalui lembaga sosial pendistribusian kekayaan dapat tercapai, bagian upaya untuk mengatasi kemiskinan, serta pemerataan pendapatan. Wujud adanya kepedulian kepada sesama umat manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Sami' Al-Mishri. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perpektif Islam*. (terj). 2009. Surabaya: Risalah Gusti.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



- Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) di INDONESIA*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
- Baznas. 2016. *Statistik Zakat Indonesia 2016*.
- Baznas. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2017*.
- Chapra, M. Umar. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Condro, Dwi Triono. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. 2012. Yogyakarta: Irtikaz.
- Condro, Dwi Triono. 2017. *Ekonomi Pasar Syariah Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 2*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Danupranata, Gita. 2006. *Seri Ekonomi Islam 3*. Yogyakarta : (UPFE UMY).
- Daulay, Raihanah. 2016. *Pengembangan Usaha Mikro Untuk Perbedayaan Ekonomi Ummat Islam di Kota Medan*. Jurnal MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Fahmi, Abu. dkk. 2014. *HRD Syariah Teori dan Implemtasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fardan, Ngoyo. 2015. *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. Jurnal Sosioreligius Volume I No. 1 Juni 2015. Makassar: Prodi Sosiologi Agama, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. 2010. Forum Riset Perbankan Syariah II. Yogyakarta: UMY.
- Hamid, Abdul dan Aris. 2017. *Peran Perbnkan Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017. Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Develompent Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Volume 2, Nomor 6. Jurnal Share Social Work Journal. 2016. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.
- Karim, Adiwarmam. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Minarni. 2015. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam; Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khasanah Kebijakan Fiskal Priode Klasik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munrokhim, Misanan. dkk (P3EI UII). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2018*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Statistik IKNB Syariah Tahun 2018*.

Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A Karim. 2017. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Panuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri. 2015. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*. Breafing Paper 02. International NGO Forum Indonesian Development.

Wahyuningsih. 2017. *Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 11 Nomor 3 September 2017. Jember: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

<http://mysharing.co/sdgs-sesuai-dengan-keuangan-syariah/>, tanggal 9 Maret 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg/>, tanggal 11 Maret 2019.

<https://sef.feb.ugm.ac.id/potensi-islamic-funding-dalam-mendukung-terpainya-sustainable-development-goals-poin-ke-10-reduced-inequality/?fbclid=IwAR1Z3vLzpBm6EVf5N3VR1zp392nzLXzCSf94S96PxQaiovZwfCKP7qpILnI> tanggal 5 April 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan), pada 10 Maret 2019.

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, tanggal 9 Maret 2019.

<https://ekbis.rmol.co/read/2016/10/10/263781/Perbankan-Syariah-Bantu-Pencapaian-Target-SDGs-> tanggal 5 April 2019.

<https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-IDB-Angkat-Peran-Ekonomi-Syariah-untuk-Mencapai-Pertumbuhan-Berkesinambungan.aspx> pada tanggal 5 April 2019.